

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL KHUSUSNYA MAKANAN DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**NIRWANDA SAYNI**

Makanan adalah suatu kebutuhan yang pokok bagi umat manusia. Pada era sekarang banyak penjual makanan-makanan olahan karena bagi masyarakat hal itu praktis dikarenakan tidak perlu menguras tenaga dan dalam mengolah makanan sekarang dengan menggunakan berbagai teknik serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tentunya semakin banyaknya penjual makanan hal ini yang membuat masyarakat Indonesia khususnya muslim seharusnya khawatir apakah makanan tersebut layak dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dimana ada sistem sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha makanan, minuman dan sebagainya. Program sertifikasi halal ini ditujukan kepada pelaku usaha untuk melindungi masyarakat khususnya islam untuk dapat mengonsumsi makanan yang halal maka dari itu setiap provinsi termasuk Lampung harus melaksanakan kebijakan sertifikasi halal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan penelitian berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Lembaga Pemeriksa Pangan, Makanan, Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dan pelaku usaha makanan yang membuat sertifikat halal. Data penelitian dikumpul dengan menggunakan instrumen berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Data kualitatif dianalisis dengan cara reduksi data, display data dan pengambilan keputusan yang menunjukkan implementasi kebijakan jaminan produk halal khususnya makanan di Provinsi halal cukup baik terbukti dengan jalannya instansi-instansi yang menjalankan implementasi jaminan produk halal di provinsi lampung ini.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan Publik, Jaminan Produk Halal

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT GUARANTEE POLICIES, ESPECIALLY FOOD IN THE PROVINCE OF LAMPUNG**

**By**

**NIRWANDA SAYNI**

Food is a basic need for human beings. In the current era there are many sellers of processed foods because for the community it is practical because there is no need to drain energy and in processing food now by using various techniques and utilizing science and technology, but of course the increasing number of food sellers, this is what makes Indonesian people, especially Muslims should worry about whether the food is fit for consumption. To meet these needs, the Indonesian government issued Law No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products where there is a halal certification system for every food, beverage and so on business actor. This halal certification program is aimed at business actors to protect the public, especially Muslims, to be able to consume halal food, therefore every province including Lampung must implement the halal certification policy. This study aims to determine how the implementation of Halal Certification Policy in Lampung Province. This research uses descriptive qualitative method. Research informants came from the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province, the Food, Food and Drug Inspection Agency of the Indonesian Ulema Council of Lampung Province and food business actors who made halal certificates. The research data was collected using instruments in the form of interviews, documentation and observations. Research data were collected using instruments in the form of interviews, documentation and observation. Qualitative data were analyzed by means of data reduction, data display and decision making which shows the implementation guarantee of halal product especially food policies in the halal province is quite good as evidenced by the running of the agencies that carry out the implementation of halal product guarantees in the Lampung province.

**Kata Kunci:** Implementation, Public Policy, Guarante Halal Product